

**MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL:
KAJIAN TRANSPARANSI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN GORONTALO**

Raihan A. Hanasi^{1*}, Moh. R. Abdullah², Riskawati Ma'ruf³, Fitra Kadir⁴, Andini Gagaube⁵, Salsa N. Baks⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL**Diterima:**

21-05-2026

Disetujui:

22-05-2026

Dipublikasi:

01-06-2026

Kata Kunci:

Maladministrasi; Bantuan Sosial; Transparansi Data Penerima

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengkaji tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi isu krusial karena berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang meliputi regulasi, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial masih tergolong rendah, yang ditandai oleh terbatasnya keterbukaan informasi, sulitnya akses data bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik dalam proses verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data bantuan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang terintegrasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

PENDAHULUAN

Penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, program bantuan sosial telah berkembang secara masif, terutama sejak diberlakukannya berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta berbagai bentuk bantuan langsung tunai lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan maladministrasi, seperti ketidaktepatan sasaran, duplikasi data, dan lemahnya sistem transparansi.

Maladministrasi dalam konteks penyaluran bantuan sosial merujuk pada penyimpangan prosedur, pengelolaan data yang tidak akurat, serta rendahnya akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap efektivitas program sosial serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai laporan Ombudsman RI menunjukkan bahwa maladministrasi dalam penyaluran bansos mencakup penundaan layanan, penyimpangan prosedur, serta keterbatasan transparansi informasi kepada publik.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan bantuan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah ini mencapai 18,7%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,36%. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial, tetapi juga meningkatkan kompleksitas tata kelola program bansos, khususnya dalam hal akurasi data dan transparansi distribusi bantuan.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa persoalan transparansi data merupakan salah satu faktor kunci dalam menjelaskan munculnya maladministrasi dalam penyaluran bansos. Prasetyo & Kurniawan (2021) menemukan bahwa ketidakakuratan basis data terpadu menjadi penyebab utama terjadinya exclusion error, yaitu kondisi di mana masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan. Sementara itu, Nugroho et al. (2022) menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi data sebagai faktor yang memperlemah akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial. Lebih lanjut, Ramadhan (2023) menegaskan bahwa lemahnya sistem informasi serta keterbukaan data pada pemerintah daerah berkontribusi signifikan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Meskipun berbagai studi tersebut telah mengidentifikasi pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek umum maladministrasi atau kajian pada level nasional dan regional. Kajian yang secara spesifik menghubungkan antara bentuk-bentuk maladministrasi dengan tingkat transparansi data penerima bantuan sosial pada level kabupaten masih relatif terbatas. Padahal, pada level inilah implementasi kebijakan berlangsung secara langsung dan berinteraksi dengan dinamika sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengambil lokus di Kabupaten Gorontalo. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo; dan (2) menganalisis tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena maladministrasi dan transparansi data bantuan sosial dalam proses penyalurannya (Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sebagai leading sector dalam pengelolaan bantuan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Data tersebut meliputi regulasi, laporan kinerja instansi, dokumen data penerima bantuan sosial, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai dokumen resmi yang relevan dengan isu transparansi data bantuan sosial dan maladministrasi dalam pelayanan publik. Pemilihan data sekunder dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi yang digunakan dalam analisis.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (2014) yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan bentuk maladministrasi dan dimensi transparansi data bantuan sosial.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang berbeda guna memperoleh konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Maladministrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Temuan ini sejalan dengan kategorisasi maladministrasi yang dikembangkan oleh Ombudsman RI (2022), namun menunjukkan karakteristik kontekstual yang dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan kapasitas lokal.

Pertama, ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Temuan menunjukkan bahwa basis data penerima bansos di Kabupaten Gorontalo masih mengandung berbagai anomali, seperti penerima yang telah meninggal dunia namun masih tercatat aktif, penerima yang telah berpindah domisili, serta keluarga mampu yang masih terdaftar sebagai penerima. Kondisi ini tidak terlepas dari lambatnya proses pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara normatif dilakukan setiap enam bulan, namun dalam praktiknya sering mengalami keterlambatan hingga lebih dari satu tahun. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses pemutakhiran data secara berkala.

Kedua, penyimpangan prosedur verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi calon penerima bansos yang seharusnya dilakukan secara ketat dalam praktiknya mengalami berbagai penyimpangan. Verifikasi faktual seringkali dilakukan secara administratif tanpa didukung kunjungan lapangan yang memadai. Selain itu, terdapat indikasi intervensi informal dari aktor lokal, seperti tokoh masyarakat dan aparat desa, dalam proses penentuan penerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses administratif tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh relasi sosial dan kepentingan lokal, sehingga berpotensi mengaburkan prinsip objektivitas dalam penetapan penerima bantuan.

Ketiga, lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Kanal pengaduan yang tersedia belum dikelola secara optimal, baik dari sisi aksesibilitas maupun responsivitas. Masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data atau mengetahui adanya penyimpangan tidak memiliki saluran yang mudah, aman, dan terpercaya untuk menyampaikan laporan. Akibatnya, berbagai permasalahan dalam penyaluran bansos tidak terdeteksi secara dini dan cenderung berulang tanpa mekanisme koreksi yang efektif.

Tabel 1.

Bentuk Maladministrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Gorontalo

No.	Bentuk Maladministrasi	Deskripsi / Temuan
1	Ketidakakuratan Data Penerima	Data DTKS tidak diperbarui secara berkala; terdapat penerima meninggal, pindah domisili, dan keluarga mampu yang masih terdaftar aktif
2	Penyimpangan Prosedur Verifikasi	Verifikasi faktual tidak dilakukan secara menyeluruh; ditemukan intervensi informal dari tokoh masyarakat dalam penentuan penerima

No.	Bentuk Maladministrasi	Deskripsi / Temuan
3	Lemahnya Mekanisme Pengaduan	Kanal pengaduan tidak dikelola optimal; masyarakat tidak memiliki saluran yang mudah dan responsif untuk melaporkan penyimpangan

Temuan ini memperkuat argumentasi Prasetyo & Kurniawan (2021) bahwa maladministrasi dalam pengelolaan bansos bersifat multidimensional. Selain dipengaruhi oleh aspek teknis administratif, maladministrasi juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan, dinamika aktor lokal, serta lemahnya sistem pengawasan yang berjalan.

Tingkat Transparansi Data Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Gorontalo

Analisis terhadap tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo dilakukan menggunakan empat indikator yang diadaptasi dari Kristiansen & Ramli (2006), yaitu keterbukaan informasi, aksesibilitas data, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari aspek keterbukaan informasi, penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo belum secara aktif mempublikasikan data penerima bantuan sosial kepada publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, implementasinya di tingkat lokal masih belum optimal. Papan informasi publik yang seharusnya memuat daftar penerima bansos seringkali tidak diperbarui, bahkan dalam beberapa kasus tidak tersedia sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Dari aspek aksesibilitas data, masyarakat masih menghadapi hambatan prosedural dalam memperoleh informasi terkait penerima bansos. Akses informasi yang masih bersifat manual, seperti keharusan datang langsung ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial, menunjukkan belum adanya sistem yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh data secara cepat dan transparan. Bahkan, dalam beberapa kasus, permintaan informasi tidak dilayani dengan alasan kerahasiaan data, yang menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dari dimensi partisipasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data masih tergolong rendah dan cenderung bersifat formalitas. Musyawarah desa atau kelurahan yang seharusnya menjadi ruang partisipatif seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek dalam pengelolaan data sosial, melainkan masih sebagai objek kebijakan.

Dari aspek pemanfaatan teknologi informasi, Kabupaten Gorontalo belum memiliki sistem informasi pengelolaan bansos yang terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pengelolaan data yang masih bersifat manual atau menggunakan aplikasi sederhana menunjukkan rendahnya tingkat digitalisasi dalam tata kelola bantuan sosial. Ketiadaan portal data terbuka (open data) semakin memperkuat rendahnya transparansi digital di daerah ini.

Tabel 2.

Penilaian Tingkat Transparansi Data Penerima Bansos di Kabupaten Gorontalo

No.	Dimensi Transparansi	Kondisi di Kabupaten Gorontalo
1	Keterbukaan Informasi	Rendah – Data penerima tidak dipublikasikan secara aktif; papan informasi tidak diperbarui

No.	Dimensi Transparansi	Kondisi di Kabupaten Gorontalo
2	Aksesibilitas Data	Rendah – Akses data terhambat prosedur birokratis; tidak tersedia saluran digital yang mudah
3	Partisipasi Publik	Rendah – Musyawarah verifikasi bersifat formalitas; masyarakat berperan pasif
4	Pemanfaatan TI	Sangat Rendah – Belum ada sistem informasi terintegrasi dan portal data terbuka untuk publik

Secara keseluruhan, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo dapat dikategorikan rendah pada keempat dimensi yang dikaji. Rendahnya transparansi ini tidak hanya menjadi masalah tersendiri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap muncul dan bertahannya praktik maladministrasi. Dalam konteks ini, transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik yang penting untuk mencegah penyimpangan dalam tata kelola bantuan sosial.

Temuan ini sejalan dengan Ramadhan (2023) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Dengan demikian, upaya peningkatan transparansi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima akibat pembaruan DTKS yang tidak konsisten, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat.

Di sisi lain, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo masih tergolong rendah pada keempat dimensi yang dikaji, yaitu keterbukaan informasi, aksesibilitas data, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara rendahnya transparansi dengan munculnya praktik maladministrasi, sehingga membentuk suatu siklus yang saling memperkuat dalam tata kelola bantuan sosial.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola bantuan sosial tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memerlukan penguatan transparansi sebagai mekanisme kontrol publik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu mengambil langkah strategis melalui pengembangan sistem pengelolaan data bansos berbasis digital yang terintegrasi, penguatan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, pembangunan portal data terbuka, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam pengelolaan data sosial. Dengan demikian, tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dapat lebih efektif diwujudkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai sumber literatur dan referensi ilmiah yang menjadi dasar dalam penulisan artikel ini sehingga kajian dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2023). *Kabupaten Gorontalo dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kristiansen, S., & Ramli, M. (2006). Buying an income: The market for civil service positions in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 28(2), 207–233. <https://doi.org/10.1355/cs28-2b>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R., Pratiwi, N., & Hidayat, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam verifikasi data penerima bantuan sosial: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(1), 45–62. <https://doi.org/10.21787/japi.4.2022.45-62>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Ombudsman RI 2022: Pengawasan pelayanan publik di sektor perlindungan sosial*. Ombudsman RI.
- Prasetyo, B., & Kurniawan, D. (2021). Exclusion error dalam penyaluran Program Keluarga Harapan: Analisis basis data terpadu. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 115–130. <https://doi.org/10.33007/jks.v9i2.115>
- Ramadhan, F. A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial di era digitalisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 78–95. <https://doi.org/10.31113/jian.v19i1.789>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.